



## **Alternatif Kebijakan Operasional Unit Pusat Informasi dan Konseling pada Remaja (PIK-R)**

**Novila Sakinah<sup>1</sup>, Catur Septiawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKes Indonesia Maju  
Gedung HZ. Jl. Harapan Nomor 50, Lenteng Agung-Jakarta Selatan 12610, Telp: (021)78894045  
Email: novila.sakinah@gmail.com<sup>1</sup>, uima.penjaminmutu@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konsultasi tentang 8 fungsi keluarga, tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan alternatif kebijakan operasional Program PIK-R di SMA Negeri 6 Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Pengambilan informan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pembina PIK-R, Ketua PIK-R, Pengurus PIK-R dan siswa. Temuan penelitian ini adalah kebijakan PIK-R masih belum optimal disebabkan karena struktur kepengurusan yang belum diperbaharui serta tidak adanya rencana kerja dan monitoring evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan program PIK-R. Alternatif kebijakan yang sesuai dengan permasalahan diatas yaitu berupa Rencana Operasional Program (ROP). Diperlukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan dan perlunya peningkatan struktural yang melibatkan warga sekolah dan peningkatan sosialisasi dalam pelaksanaan program PIK-R di sekolah.

**Kata Kunci :** Alternatif, Kebijakan Operasional, PIK-R

### **Abstract**

Youth Information and Counseling Center (PIK-R) policy as one of the platforms developed in the GenRe program, which is managed by and for adolescents to provide information and consultation services on 8 family functions, three basic threats to adolescent reproductive health, life skills, gender and advocacy skills as well as communication, information and education. The purpose of this study is to present alternative operational policies for the PIK-R program at SMA Negeri 6 Pontianak. This research is a qualitative research with a case study approach. Data collection techniques using in-depth interviews and observation. Informant uses a *purposive sampling* technique. Key informants in this study were the principal, the PIK-R trustees, the PIK-R chairperson, the PIK-R management and students. The findings of this study are the PIK-R policies are still not optimal due to the management structure that has not been updated and the absence of an integrated work plan and monitoring evaluation of the implementation of the PIK-R program activities. Alternative policies that are in accordance with the problems above are in the form of a Program Operational Plan (ROP). Needed monitoring and evaluation of each activity and the need for structural improvements involving school residents and increased socialization in the implementation of the PIK-R program in schools.

**Keywords:** Alternative, Operational Policy, PIK-R

## Pendahuluan

Menurut *World Health Organization* remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun.<sup>1</sup> Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Data Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) menyatakan jumlah remaja laki-laki usia 15-19 sebesar 4,5%, usia 20-24 sebesar 14,6%, remaja perempuan usia 15-19 sebesar 0,7%, usia 20-24 sebesar 1,8%. Semakin meningkatnya remaja setiap tahun maka pergaulan remaja semakin rentan jika tidak diberikan pendidikan dini.<sup>2</sup> Remaja merupakan kelompok masyarakat yang hampir selalu diasumsikan dalam keadaan sehat. Akan Tetapi banyak remaja yang meninggal sebelum waktunya contohnya akibat kecelakaan, percobaan bunuh diri, kekerasan, kehamilan yang mengalami komplikasi dan penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati.<sup>3</sup>

Pusat informasi dan konseling merupakan suatu wadah yang dikembangkan dalam program Generasi Berencana (GenRe) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja atau mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konsultasi mengenai pendewasaan usia pernikahan, delapan fungsi keluarga, tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi.<sup>4</sup>

Sejak tahun 2007, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menginisiasi pembentukan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Seiring berjalannya waktu program tersebut berkembang menjadi program informasi dan konseling remaja/mahasiswa. Keberadaan dan peranan PIK-R di lingkungan menjadi sangat penting karena akan membantu remaja untuk mendapatkan informasi dan pelayanan konsultasi yang baik dan benar mengenai persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.<sup>5</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh bahwa SMAN 6 Pontianak merupakan sekolah unggulan dan menjadi rujukan akan tetapi masalah reproduksi remaja jumlah kasusnya masih banyak. Informasi yang didapat oleh peneliti bahwa pada tahun 2018 terdapat 3 orang siswi kelas XI dan 4 orang siswi kelas XII yang mengalami kehamilan diluar nikah sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Hal ini merupakan kejadian yang sangat fatal dan bisa menyebabkan rusaknya masa depan remaja. Hasil wawancara dengan satu guru BK di SMAN 6 Pontianak mengatakan PIK-R di SMAN 6 Pontianak membentuk Unit PIK-R pada Tahun 2013 namun unit tersebut tidak berjalan secara optimal dikarenakan adanya pergantian pimpinan dan tidak adanya pengurus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekomendasikan alternatif kebijakan Unit Pusat Informasi dan Konseling pada Remaja (PIK-R) di SMAN 6 Pontianak, Kalimantan Barat 2019.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat terbatas waktu.<sup>6</sup> Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 6 Pontianak, Kalimantan Barat pada bulan Desember 2019. Penentuan informan digunakan tehnik *purposive sampling* yaitu tehnik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap orang yang paling mengetahui tentang apa yang diharapkan.<sup>7</sup> Narasumber dalam penelitian ini dibagi atas informan kunci yaitu Kepala Sekolah dan informan pendukung yaitu Pegawai BKKBN Daerah, Wakasek Kesiswaan, Guru BK, Ketua Osis dan Konselor sebaya.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan berupa observasi dan wawancara terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tidak berjalannya Program Unit Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMAN 6 Pontianak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran masalah yang berkaitan dengan alternatif kebijakan operasional unit PIK-R di SMAN 6 Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam yaitu untuk mendapatkan gambaran mengapa suatu hal terjadi melalui perspektif peneliti, dilakukan kepada Kepala Sekolah, Pembina, Ketua, Pengurus dan siswa mengenai sumber-sumber kebijakan, wewenang kebijakan, pelaksanaan PIK-R, Fasilitas, KIE, sosialisasi PIK-R serta konsistensi. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam ini terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang mengenai pendapat, pengalaman, perasaan dan pengetahuannya dan didapatkan beberapa masalah yang kemudian diidentifikasi menjadi 5 tema. Observasi dilakukan melalui teknik *observer as outsider*. Teknik *observer as outsider* dilakukan untuk mendapat gambaran mengapa suatu hal terjadi melalui perspektif peneliti. Hasil observasi yaitu berupa pengamatan fasilitas PIK-R, sumber daya PIK-R, komunikasi serta kebijakan PIK-R tersebut.

Pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan laporan atau data masalah di SMAN 6 Pontianak yaitu data siswa dengan masalah kesehatan reproduksi serta laporan tahunan data siswa yang melakukan bimbingan dan konseling. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara mendalam dengan dibantu oleh perekam suara dan alat tulis. Alat perekam suara yang digunakan adalah *handphone*. Instrumen untuk pengamatan

langsung, peneliti menggunakan kamera digital agar lebih efektif dan efisien.

Validasi atau keabsahan data dapat diketahui dengan metode triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk melihat gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan teknik. Peneliti menggunakan 2 triangulasi yaitu triangulasi sumber untuk membandingkan jawaban informan (Wakasek kesiswaan, Ketua Osis, Konselor sebaya, Guru Bk, pegawai BKKBN) dengan jawaban informan kunci (Kepala Sekolah, Pembina PIK-R, Ketua PIK-R, Pengurus PIK-R dan siswa) dan triangulasi data untuk membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian yaitu peneliti melakukan observasi terhadap dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, gambar atau foto, masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda kemudian akan memberikan pandangan berbeda untuk peneliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merinci menjadi variabel-variabel yang saling berkaitan dan dilaksanakan secara sistematis.<sup>8</sup> Proses pengolahan analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu catatan lapangan terkumpul dikembangkan menjadi *expanded field notes* yaitu catatan singkat dilapangan dikembangkan ke dalam transkrip data untuk melengkapi jawaban informan dari rekaman, membuat transkrip data, mengkategorikan data sesuai kategori, meringkas data dengan matriks dan diagram, melakukan interpretasi analisis data dengan mengambil kesimpulan dari membaca matriks dan diagram hasil penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Informan yaitu informan dipilih secara purposive yaitu mereka yang dianggap memahami

permasalahan secara mendalam dan dianggap dapat memberikan informasi mendalam diantaranya Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Pembina PIK-R, Ketua PIK-R, Pengurus PIK-R, Pegawai BKKBN, Guru BK, Konselor Sebaya, Ketua Osis dan siswa. Informan memiliki derajat pemahaman dan informasi yang berbeda. Informan Kunci yaitu Kepala Sekolah (A1), Pembina PIK-R (A2), Ketua PIK-R (A3), Pengurus PIK-R (A4), Siswa (A5).

Peneliti menggunakan hasil analisis tematik dengan mengidentifikasi 5 tema yaitu sumber daya, kebijakan/legal, konselor sebaya, struktur birokrasi, sikap dan komunikasi.

### Sumber Daya

Menurut Edward III didalam buku Subarsono mengatakan dimensi sumber daya meliputi manusia, peralatan, informasi dan kewenangan. Dalam penelitian ini distribusi sumber daya masih memiliki kekurangan.<sup>9</sup> Hasil wawancara mendalam menyatakan staff sudah cukup baik dan menguasai bidangnya, namun jumlah staff yang dimiliki masih kurang mencukupi dari kebutuhan, sehingga sumber daya yang minim ini menimbulkan keterbatasan dalam mengkoordinir penyelenggaraan program dan masih banyak pengurus yang belum mengerti dan bekerja sesuai porsinya, sehingga dibebankan kepada orang yang lebih aktif dan program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berikut pernyataan dari informan kunci mengenai hal ini:

*“Memang kami akui tahun ini program PIK-R berjalan tersendat. Kami lebih memfokuskan anak-anak kepada mata pelajaran yang ada dalam kurikulum karena untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional” (A1)*

*“Program PIK-R di sekolah kami memang sudah terbentuk, namun tidak berjalan sejak tahun lalu, karena kurangnya tenaga” (A2)*

*“Struktur kepengurusan belum diperbaharui. Masih menggunakan struktur yang lama, padahal banyak anggota yang telah tamat dan yang ada sekarang tinggal*

*anggota yang dulunya mereka masih kelas 1 waktu pembentukan pengurus” (A3)*

*“Ada, angkatan sebelumnya ada pelatihan. Setiap pergantian kepengurusan pasti ada pelatihan. Tapi untuk kepengurusan angkatan tahun ini belum ada pelatihan” (A4)*

*“Seharusnya ada pelatihan namun tahun ini belum terlaksana, tapi memang akan direncanakan pelatihan. Kemarin sebelum libur lebaran ada rencana akan diadakan pelatihan tapi diundur sampai sekarang belum terlaksana karena bentrok dengan kegiatan lain, seperti kemah, ujian semester, remidi.*

*Walaupun demikian kalau ada pelatihan dari instansi luar yang terkait dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) kita pasti ikut berpartisipasi” (A6)*

*“Dengan sumber daya manusia yang sangat kurang seharusnya perlu diadakan refresh materi dan pelatihan agar kemampuan pendidik sebaya dan konselor sebaya meningkat” (A9)*

*“Iya, memang setiap tahunnya ada pelatihan dan pembinaan dari BKKBN yaitu diutus 2 siswa dan 1 guru untuk ikut tetapi tahun ini tidak mengikuti” (A10).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten terutama untuk pendidik sebaya dan konselor sebaya perlu diadakan *refresh* materi dan pelatihan untuk pendidik sebaya dan konselor sebaya. Akan tetapi, pelatihan untuk pendidik sebaya dan konselor sebaya tahun ini belum terlaksana. Belum ada pelatihan untuk pendidik sebaya dan konselor sebaya yang diadakan oleh internal sekolah.

SMAN 6 Pontianak belum memiliki ruangan khusus untuk PIK-R namun yang tersedia adalah ruangan bimbingan konseling yang digunakan oleh siswa-siswi SMAN 6 Pontianak untuk melakukan bimbingan dan konseling jika memiliki permasalahan terkait belajar, sosial dan kesehatan reproduksi. Namun, sangat sedikit siswa-siswi yang berkonsultasi tentang masalah kesehatan reproduksi. Mereka lebih sering menceritakan masalah kesehatan reproduksi kepada teman sebaya. Selain itu, dana yang digunakan untuk operasional yaitu dari dana komite

dan biaya operasional sekolah. Namun, dalam hal dana yang dianggarkan terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan dalam pemenuhan program. Pernyataan terkait dengan fasilitas adalah sebagai berikut :

*“Di SMAN 6 Pontianak sudah terdapat LCD, laptop sekolah juga bisa dipinjam, buku-buku, modul kesehatan reproduksi remaja, kliping kesehatan reproduksi remaja, wifi, papan mading dan kotak surat masalah. Tapi sayangnya, kita belum memiliki ruangan khusus untuk PIK-R” (A2)*  
*“Kita masih merasa kurang untuk sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan program PIK-R. Belum ada ruangan khusus untuk PIK-R. Sarana prasarana yang ada yaitu ruang BK untuk siswa yang ingin berkonsultasi, kemudian ada wifi, laboratorium, komputer bisa digunakan pada saat jam sekolah” (A3)*  
*“Tidak jauh berbeda dengan kegiatan belajar mengajar lainnya. Sarana dan prasarannya ada ruang-ruang kelas yang bisa dipakai, ruang laboratorium komputer dan ruangan BK. Namun kalau ruang khusus PIK-R memang belum ada” (A9)*

Fasilitas fisik bisa menjadi sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan. Namun, tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.<sup>10</sup>

Penyampaian informasi belum sepenuhnya terjalin baik, dalam pergantian anggota tidak diikuti dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh anggota dan penyampaian tugas dari staff lama pada staff baru belum efektif sehingga staff pengganti masih banyak kekurangan informasi mengenai gambaran-gambaran tugasnya seperti apa.<sup>11</sup> Berikut Pernyataan terkait dengan informan kunci dan pendukung adalah :

*“Sumber daya informasi yang tersedia biasanya dari pihak BKKBN dengan melakukan penyuluhan dan melakukan pelatihan konselor tiap tahun. Namun 1 tahun ini belum ada informasi untuk pelatihan konselor sebaya” (A2)*

*“Sumber daya informasi bisa diperoleh dari modul yang sudah dibuat oleh BKKBN, buku-buku yang ada dipergustakaan dan bisa juga menggali informasi dari pembina, pendidik sebaya dan konselor sebaya” (A9)*

Bentuk kedua dari informasi adalah tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksanaan harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menaati undang-undang atau tidak.<sup>12</sup>

### **Kebijakan/Legal**

Kebijakan tersebut sudah disosialisasikan di beberapa sekolah baik Negeri maupun Swasta namun belum 100% sekolah yang disosialisasikan. Menurut Wakasek Kesiswaan, kebijakan PIK-R sudah disosialisasikan ke lingkungan sekolah oleh guru dan siswa. Menurut Pembina PIK-R SMAN 6 Pontianak tidak terdapat hambatan saat melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, belum tersedianya ruangan khusus untuk PIK-R. Berikut pernyataan informan :

*“Kebijakannya sudah ada dan yang terlibat dalam perumusan kebijakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah guru BK, bapak ibu guru yang memiliki perhatian pada permasalahan remaja (guru Agama) dibantu kepala sekolah, Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Kurikulum” (A1)*

*“Yang terlibat adalah guru bimbingan konseling, guru agama, Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum dan saya sendiri. Wakasek Kurikulum membentuk suatu susunan struktur kurikulum kebijakan program PIK-R” (A6)*

*“Tujuannya untuk mencegah serta menghilangkan kasus-kasus remaja yang menyimpang contohnya kehamilan tidak diinginkan, merokok, narkoba dan lain sebagainya. Selain itu adanya kebijakan unit PIK-R di SMAN 6 Pontianak bertujuan untuk memberikan bekal atau ilmu seputar remaja itu seperti apa yaitu untuk membantu mengarahkan pembentukan diri mereka” (A1)*

*“Tujuan kebijakan unit PIK-R di SMAN 6 Pontianak adalah untuk menghilangkan kehamilan tidak diinginkan, memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja yang dapat dipertanggung jawabkan*

*nilai kebenarannya dan sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya” (A2)*

Carl Fredrich seorang ilmuwan politik didalam buku Subarsono mengatakan kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.<sup>13</sup>

### **Konselor Sebaya**

Menurut informan kunci konselor sebaya memang ada namun belum mendapat pelatihan dan pembinaan dari BKKBN kalau dari sekolah sendiri sudah melatih. Sedangkan dari informan pendukung mengatakan tidak pernah mengetahui adanya konselor sebaya. Pernyataan didapatkan dari konselor sebaya sendiri dia dipilih dari sekolah dan sudah dilatih 1 kali oleh guru BK namun belum pernah aktif dalam kegiatan. Berikut pernyataan informan :

*“ada, sudah dipilih dan disiapkan dan dilatih namun belum pernah mendapat pembinaan tentang konselor itu seperti apa. Tapi tahun ini belum diadakan pembinaan” (A2)*

*“Tidak, tidak pernah, tidak tahu” (A5)*

*“Belum ada dan tidak pernah curhat dengan konselor sebaya” (A7)*

*“ada dari pengurus periode kemarin, sudah dilatih tetapi belum mendapat pembinaan” (A9)*

*“Kami Bulan September 2018 kemarin dipilih 5 orang sebagai konselor sebaya dan sudah dilatih sebanyak satu kali. Iya, memberikan informasi dan penyuluhan serta konseling kepada remaja jika ada masalah memberikan solusi tetapi tidak tetap” (A8)*

Penelitian yang dilakukan Crosnoe didalam buku Subarsono menemukan bahwa karakteristik teman sebaya memiliki pengaruh yang penting

terhadap perkembangan remaja. Hal ini antara lain terlihat pada rata-rata prestasi belajar yang tinggi serta konsisten telah menjadi prediktor bagi prestasi sekolah yang positif. Sebaliknya prestasi belajar yang rendah telah menjadi prediktor bagi perilaku-perilaku negatif seperti penyalahgunaan obat terlarang.<sup>14</sup>

### **Struktur Birokrasi**

Terkait dengan struktur birokrasi, dalam implementasi kebijakan Unit PIK-R di SMAN 6 Pontianak kaitannya komunikasi dengan instansi diluar sekolah. Kepala Sekolah mengatakan sebagai berikut:

*“Konsultan dari luar sekolah ada yaitu dari petugas BKKBN mengenai tiga ancaman dasar, Polres Pontianak penyuluhan dari kepolisian biasanya mengenai Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), Puskesmas Saigon mengenai kesehatan reproduksi remaja namun waktunya tidak pasti” (A1)*

*“Ada, pernah ada 1 kali dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Puskesmas Dinas Kesehatan Saigon, Mahasiswa AKPER Yarsi tapi sangat jarang sekali” (A2)*

*“Kalau pengawasan jelas ada, melalui rapat pengurus dan pertemuan rutin ada kontrol dari Pembina namun banyak anggota yang tidak disiplin” (A2)*

*“Kurangnya pengawasan dan kontrol Pembina. Kontrol dari Kepala Sekolah hanya melalui kontrol administrasi dari laporan pertanggung jawaban kegiatan tiap semester namun sudah setahun program ini tidak berjalan” (A3)*

*“Ada konsultan dari luar sekolah yaitu dari petugas Badan Kependudukan Keluarga Berencana mengenai tiga ancaman dasar salah satunya seksualitas dan HIV/AIDS, selain itu terdapat konsultan dari Polres Pontianak mengenai penyuluhan dari kepolisian biasanya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), Puskesmas Saigon mengenai kesehatan reproduksi remaja namun waktunya tidak pasti dan dari mahasiswa AKPER Yarsi tapi sangat jarang sekali” (A6)*

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Unit PIK-R di

SMAN 6 Pontianak belum berjalan dengan baik, kurang adanya pengawasan dari Pembina dan Kepala Sekolah serta kurangnya dukungan dari instansi diluar sekolah yang terkait dengan implementasi kebijakan program PIK-R.

### **Komunikasi**

Komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan unit PIK-R di SMAN 6 Pontianak antara pihak-pihak terkait yang terlibat adalah Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Pembina, Pengurus dan siswa. Cara untuk mensosialisasikan implementasi kebijakan program PIK-R kepada warga sekolah dengan cara :

*“Untuk mensosialisasikan kepada warga sekolah dilakukan melalui launching ekstrakurikuler PIK-R di SMAN 6 Pontianak pada tanggal 07 Juli 2014 pada saat MOS oleh Wakasek Kesiswaan” (A2)*

*“Melalui launching ekstrakurikuler PIK-R di SMAN 6 Pontianak pada tanggal 07 Juli 2014 pada saat MOS oleh saya sendiri kemudian siswa diintruksikan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang diminati melalui angket yang telah dibagikan untuk tahun pelajaran 2014/2015” (A6)*

*“Penyampaian materi dilakukan dengan bedah film, presentasi, Games, pembelajaran diluar kelas back to nature agar materinya lebih mengena. Bagaimana caranya agar tidak bosan, menyenangkan dan merasa tidak digurui agar materi dapat tersampaikan. Yang memberikan materi dari pendidik sebaya dan ada juga dari luar” (A3)*

Komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakan ekstrakurikuler pada awal kebijakan diterapkan berlangsung dengan baik dengan adanya *launching* ekstrakurikuler PIK-R semua warga sekolah mengetahui keberadaan kebijakan ini. Akan tetapi kejelasan kebijakan yang akan dikomunikasikan tidak sepenuhnya tersampaikan kepada warga sekolah. Hal ini terlihat dari ada siswa yang bukan anggota ekstrakurikuler PIK-R tidak mengetahui keberadaan dari pendidik sebaya dan konselor sebaya.

### **Merumuskan Analisis Kebijakan Operasional**

Perumusan analisis kebijakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Patton dan Savickly yang menggunakan enam langkah dalam merumuskan analisis yang pertama yaitu mengidentifikasi, verifikasi masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan program pusat informasi dan konseling belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PIK-R di SMAN 6 Pontianak.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah belum memiliki rencana kerja dan evaluasi rutin, keterbatasan dari sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya kedisiplinan dari pengurus dan anggota sehingga hasilnya tidak maksimal, belum terjalannya penguatan struktur yang melibatkan semua warga sekolah, keterbatasan dari sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan program pusat informasi dan konseling remaja, keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program pusat informasi dan konseling pada remaja, keterbatasan pengelolaan dan pembinaan tenaga terlatih sebagai konselor sebaya.

Langkah kedua yaitu menetapkan dan menentukan kriteria evaluasi. Selanjutnya dari 8 faktor tersebut dilakukan pemilihan isu *actual* yang memenuhi kriteria yaitu belum memiliki rencana kerja dan evaluasi rutin, keterbatasan dari sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya kedisiplinan dari pengurus dan anggota sehingga hasilnya tidak maksimal, belum terjalannya penguatan struktur yang melibatkan semua warga sekolah serta kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan program pusat informasi dan konseling remaja.

Selanjutnya, untuk mempermudah menganalisis permasalahan yang menjadi prioritas dilakukan penilaian tingkat *urgency*. Penilaian USG dimaksudkan

untuk menentukan isu mana yang paling dominan, didapatkan hasil membuat rencana kerja dan monitoring evaluasi terpadu, penguatan struktur yang melibatkan semua warga sekolah dan ketidaksiplinan dari pengurus dan anggota program informasi konseling remaja.

Langkah ketiga yaitu melakukan analisis *Strength Weaknesses Oportunity Threats* (SWOT) dengan melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal kemudian serta membuat matriks internal faktor *evaluation* dan matriks eksternal faktor *evaluation* didapatkan hasil yaitu

**Tabel 1.** Analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*)

| Faktor Utama  | Weight | Alternatif Strategi |             |            |             |            |             |
|---|--------|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|   |        | Strategi 1          |             | Strategi 2 |             | Strategi 3 |             |
|   |        | AS                  | TAS         | AS         | TAS         | AS         | TAS         |
| 1   | 2      | 3<br>(1x2)          | 4           | 5<br>(1x4) | 6           | 7<br>(1x6) |             |
| <b>Faktor Internal</b>  |        |                     |             |            |             |            |             |
| <b>Kekuatan</b>   |        |                     |             |            |             |            |             |
| Adanya kebijakan Kepala Sekolah untuk melaksanakan program PIK-R              | 0,06   | 4                   | 0,24        | 4          | 0,24        | 4          | 0,24        |
| Adanya pengurus PIK-R   | 0,07   | 3                   | 0,21        | 3          | 0,21        | 2          | 0,14        |
| Adanya tenaga untuk melatih konselor sebaya                                   | 0,08   | 3                   | 0,24        | 2          | 0,16        | 1          | 0,08        |
| Tersedianya dana untuk pelaksanaan PIK-R                                      | 0,09   | 4                   | 0,36        | 3          | 0,27        | 1          | 0,09        |
| Adanya komitmen untuk terus melakukan pengembangan PIK-R                      | 0,06   | 3                   | 0,18        | 3          | 0,18        | 3          | 0,18        |
| Adanya sumber informasi mengenai Kesehatan reproduksi                         | 0,05   | 3                   | 0,15        | 2          | 0,10        | 2          | 0,10        |
| Lokasi sekolah yang strategis dan memiliki banyak siswa                       | 0,09   | 4                   | 0,36        | 3          | 0,27        | 2          | 0,18        |
| <b>Kelemahan</b>  |        |                     |             |            |             |            |             |
| Jumlah SDM rendah/kurang  | 0,08   | 4                   | 0,32        | 4          | 0,32        | 2          | 0,16        |
| Belum tersedianya ruang khusus untuk PIK-R                                    | 0,06   | 4                   | 0,24        | 3          | 0,18        | 2          | 0,12        |
| Pembentukan konselor sebaya belum merata                                      | 0,07   | 2                   | 0,14        | 2          | 0,14        | 1          | 0,07        |
| Belum adanya rencana kerja dan monev terpadu                                  | 0,09   | 4                   | 0,36        | 3          | 0,27        | 2          | 0,18        |
| Kurangnya kegiatan sosialisasi dari program PIK-R                             | 0,06   | 2                   | 0,12        | 2          | 0,12        | 2          | 0,12        |
| Belum adanya pembaharuan struktur kepengurusan                                | 0,08   | 3                   | 0,24        | 3          | 0,24        | 1          | 0,08        |
| Ketidaksiplinan anggota   | 0,06   | 4                   | 0,24        | 3          | 0,18        | 4          | 0,24        |
| <b>Peluang</b>  |        |                     |             |            |             |            |             |
| Didukung oleh Undang-Undang dan Keputusan Bupati dan Kepala sekolah           | 0,17   | 4                   | 0,86        | 3          | 0,51        | 3          | 0,51        |
| Didukung oleh sumber dana BOS dan Komite                                      | 0,18   | 3                   | 0,54        | 3          | 0,54        | 1          | 0,18        |
| Adanya kerja sama dengan instansi lain  | 0,15   | 1                   | 0,15        | 1          | 0,15        | 2          | 0,30        |
| <b>Ancaman</b>  |        |                     |             |            |             |            |             |
| Program PIK-R belum dikenal baik oleh warga sekolah                           | 0,17   | 4                   | 0,86        | 3          | 0,51        | 3          | 0,51        |
| PIK-R berjalan belum kondusif akibat kurangnya koordinasi dari berbagai pihak | 0,16   | 3                   | 0,48        | 2          | 0,32        | 4          | 0,64        |
| Banyak masalah kesehatan reproduksi   | 0,17   | 2                   | 0,34        | 2          | 0,34        | 2          | 0,34        |
| <b>Total</b>  |        |                     | <b>6,63</b> |            | <b>5,25</b> |            | <b>5,09</b> |
| <b>Rangking</b>   |        |                     | <b>I</b>    |            | <b>II</b>   |            | <b>III</b>  |



bahwa salah satu masalah yang menonjol adalah belum adanya rencana kerja dan monev terpadu serta perlu pembabahaaran struktur kepengurusan serta semua staff belum mengerti, paham dan bertanggung jawab akan tugasnya dalam pencapaian visi dan misi bersama. Langkah empat yaitu evaluasi alternatif kebijakan dengan menggunakan *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM).

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 3 strategi yaitu membuat rencana kerja dan monitoring evaluasi terpadu dengan nilai tertinggi 6,63, penguatan struktural dengan melibatkan warga sekolah dan sektor yang terkait dengan nilai 5,25 dan meningkatkan sosialisasi dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi dengan nilai 5,09.

Langkah kelima yaitu menyajikan alternatif kebijakan dengan melakukan skoring analisis *Critical Success Factor* (CSF) maka diperoleh 2 alternatif. Alternatif pertama membuat rencana kerja dan monitoring evaluasi secara rutin dan alternatif kedua penguatan struktural dengan melibatkan warga sekolah dan sektor yang terkait dalam pelaksanaan program pusat informasi dan konseling pada remaja. Maka yang menjadi rekomendasi alternatif dengan prioritas utama yaitu membuat rencana kerja dan monev terpadu dan harus dilaksanakan dengan segera. Rencana kerja ini dibuat agar segala bentuk program dan rencana dalam pelaksanaan program PIK-R di SMAN 6 Pontianak bisa terarah dan terlaksana dengan optimal. Langkah keenam yaitu memonitoring hasil setelah menyajikan alternatif yang sesuai dengan masalah serta kondisi di SMAN 6 Pontianak, kemudian membuat rencana kerja dan monev terpadu berupa Rencana Operasional Program (ROP) agar dapat memonitoring hasil.

## Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa masalah yang menyebabkan pelaksanaan unit PIK-R belum berjalan secara optimal yaitu belum memiliki rencana kerja dan evaluasi rutin serta keterbatasan dari sekolah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terbatas. Faktor utama dari kriteria evaluasi yaitu belum adanya rencana kerja dan monev terpadu dalam pelaksanaan PIK-R di SMAN 6 Pontianak. Maka dibuatlah strategi-strategi pada evaluasi alternatif kebijakan yaitu membuat rencana kerja dan monev terpadu, penguatan struktural yang melibatkan semua warga sekolah dan sektor lain serta peningkatan sosialisasi dalam pelaksanaan program PIK-R. Kemudian merekomendasikan alternatif yang sesuai dengan masalah yaitu berupa Rencana Operasional Program (ROP) agar dapat memonitoring hasil. Selain itu secara otomatis kegiatan PIK-R dapat berjalan dengan optimal karena adanya kerjasama tim dan uraian tugas yang jelas.

## Daftar Pustaka

1. WHO. Adolescent health [homepage on the internet]. 2018 [cited 2019 August 07]. Available from [https://www.who.int/maternal\\_child\\_adolescence/en/#tab=tab\\_1](https://www.who.int/maternal_child_adolescence/en/#tab=tab_1)
2. SDKI. Laporan SDKI [homepage on the internet]. 2017. [cited 2019 August 21]. Available from <http://e-koren.bkkbn.go.id>
3. IDAI. Pengaruh Kesehatan Reproduksi Remaja [homepage on the internet]. 2016. [cited 2019 August 10]. Available from <http://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/kesehatan-remaja-di-indonesia-2016->
4. BKKBN. Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jakarta; BKKBN; 2018
5. BKKBN. Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jakarta; BKKBN; 2016
6. Herdiansyah. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta ; Salemba Medika ; 2015
7. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung ; Alfabeta ; 2017
8. Rangkuti. Analisa SWOT dan Analisis Tematik: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta ; PT. Gramedia ; 2015

9. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar ; 2015
10. Indiahono, D. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta; Gaya Media; 2015
11. Suwitri. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang; UNDIP; 2016
12. Nugroho. Public Policy. Jakarta; PT. Alex Media Komputido; 2015
13. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar ; 2015
14. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar ; 2015
15. Dwijowijoto. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta ; PT. Alex Media Komputido ; 2014.